

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Wiwik & Hatta Ermataty. 2012. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi Pada Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vo. 7 No. 2, Desember, ISSN 1858-3687, Hal 24-35.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Cipta, Hendra. 2011. Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar). Tesis. Universitas Andalas. Padang.
- Halim, Abdul & Theresia Damayanti. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Isti'anah. 2010. Penerapan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Direktorat Transformasi Perbendaharaan Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan RI. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, Vol. 5 No. 1, Januari, Hal 73-84.
- Mardalis. 2002. *Metodologi Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pamungkas, Janti. 2009. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2008. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sulistio, E.B. 2010. Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, Januari.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia

